

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*Perkembangan zaman yang semakin kompleks dalam aspek teknologi, aspek pendidikan, aspek gaya hidup, sampai ekonomi menjadi tantangan bagi seluruh negara. Hal tersebut menjadikan pemerintah Indonesia diharuskan terus bergerak menciptakan inovasi atau terobosan dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat dan menghindari ketertinggalan dari negara lain dalam konteks pendidikan hingga perekonomian itu sendiri. Perekonomian merupakan salah satu aspek yang perlu ditingkatkan secara kontinyu dan menyeluruh yang mana di dalamnya terdapat sektor jasa keuangan yang turut pula menjadi sektor vital bagi sebuah keberlangsungan negara.*

*World Bank, dalam "World Economic Situation and Prospect 2017", mengevaluasi perkembangan ekonomi global dan menilai masih terjebak dalam episode pertumbuhan yang rendah berkepanjangan. IMF dalam World Economic Outlook 2017 menyampaikan sepanjang tahun 2016, ekonomi dunia hanya mampu tumbuh 3,1 persen dan diperkirakan akan tumbuh menjadi 3,5 persen di tahun 2017 dan 3,6 persen di tahun 2018. Rendahnya pertumbuhan global ini disebabkan rendahnya investasi global yang mendorong melemahnya global productivity growth di berbagai negara, meningkatnya level hutang luar negeri secara agregat dan disertai turunnya gradual pertumbuhan perdagangan dunia, yang hanya 1,2 persen tahun 2016. Menyikapi kelemahan sistem perekonomian global tersebut, Bank Indonesiamenilai perlu semakin intensif mengembangkan sistem ekonomi dan keuangan syariah. Hal ini didorong keyakinan*

*sistem ini memiliki potensi sebagai sumber pertumbuhan baru, memperbaiki stabilitas ekonomi dan keuangan domestik sehingga dapat tumbuh secara lebih berkelanjutan dan lebih berkeadilan.<sup>1</sup>Kemudian terdapat pula kajian yang dilakukan oleh Master Card pada tahun 2013 menyebutkan bahwa Index Financial Access Indonesia pada tahun 2013 masih kalah jika dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Index Financial Access Indonesia 60 poin, sedangkan Singapura 72 poin, Malaysia 70 poin, Thailand 68 poin. Industri jasa keuangan sendiri di Indonesia dari tahun ke tahun memberikan peranan yang cukup besar bagi masyarakat.<sup>2</sup>*

*Hubungan yang signifikan antara penguatan sektor keuangankhususnya keuangan formal dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan peningkatan kesejahteraan.Di samping itu, sistem keuangan yang inklusif berperan penting dalam pengentasan kemiskinan dan mengurangi perbedaan pendapatan.Penelitian yang dilakukan oleh Khasnobis dan Mavrotas di tahun 2008mengatakan, bahwa mobilisasi yang efektif dari tabungan dalam negeri untuk investasi swasta memainkan peran kunci dalam mencapai pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan. Oleh karena itu sebuah sistem keuangan yang efisien dan inklusif akanmemberdayakan individu, memfasilitasi pertukaran barang dan jasa, mengintegrasikan masyarakat dengan perekonomian serta memberi perlindungan terhadap guncangan ekonomi.<sup>3</sup>*

*Bank Indonesia (BI) menerangkan bahwa kemudahan akses layanan jasa keuangan merupakan syarat penting melibatkan masyarakat luas dalam sistem perekonomian.Kemudahan akses masyarakat terhadap layanan jasa lembaga*

---

<sup>1</sup>[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), diakses 27 Desember 2019, pukul 13.15

<sup>2</sup> OJK, *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) Revisit 2017*, Jakarta: OJK, 2017, 13

<sup>3</sup>Rakhmindyarto dan Syaifullah, *Keuangan Inklusif dan Pengentasan Kemiskinan*, [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id), diakses 23 Januari 2020, pukul 10.16,

*keuangan menjadi bagian yang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta stabilitas sistem keuangan. Sehingga mereka dapat menikmati pelayanan jasa lembaga keuangan sebagai fasilitas simpan pinjam yang mendukung kehidupan sehari-hari. Dengan kegiatan pembiayaan dan juga tabungan yang disediakan oleh lembaga keuangan, mereka dapat mempergunakannya sebagai penunjang kegiatan perekonomian agar memperbaiki taraf hidupnya.<sup>4</sup>*

*Istilah sistem keuangan inklusif atau dalam bahasa Inggris financial inclusion bersinonim dengan frasa inclusive financial system, yang berarti sistem jasa layanan keuangan yang bersifat universal, noneksklusif. Inklusivitas sistem keuangan ini sebenarnya lebih merujuk pada visi untuk menciptakan satu sistem jasa keuangan yang mampu menjangkau semua kalangan.<sup>5</sup> Di samping itu, survei Bank Dunia pada tahun 2010 menunjukkan hanya 49 persen rumah tangga Indonesia yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal dan lembaga keuangan sebesar 48 persen kegiatan keuangan inklusif menjadi salah satu agenda penting dalam dunia internasional. Forum internasional seperti, G20, APEC, AFI, OECD, dan ASEAN secara intensif melakukan pembahasan mengenai keuangan inklusif. Pembahasan tersebut turut pula menjadi prioritas bagi Pemerintah Indonesia, yakni terbukti pada bulan Juni 2012, Bank Indonesia bekerjasama dengan Sekretariat Wakil Presiden – Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Badan Kebijakan Fiskal – Kementerian Keuangan mengeluarkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Strategi ini berisi*

---

<sup>4</sup> Harianto Wijayanto, *Fungsi Inklusi Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan Masyarakat*, UIN Sunan Kalijaga, 2016, 3

<sup>5</sup> Nusron Wahid, *Keuangan Inklusif: Membongkar Hegemoni Keuangan*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2014, 24

*kerangka kerja, implementasi dan langkah kedepan pelaksanaan keuangan inklusif.<sup>6</sup> Hasil survei tersebut mengandung pesan bahwa tidak ada pilihan lain bagi bangsa Indonesia kecuali membuat program dan kebijakan untuk meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat miskin, yakni program dan kebijakan yang dapat menjadi solusi bagi rumah tangga miskin yang kesulitan mendapatkan dukungan kredit dari lembaga keuangan formal.<sup>7</sup>*

*Financial inclusion mengacu kepada akses ke berbagai jasa keuangan, dengan biaya yang wajar, bagi orang-orang yang dianggap tidak bankable serta mereka menjalankan usaha di daerah perdesaan. Layanan tersebut mencakup tabungan, kredit jangka pendek maupun jangka panjang, sewa guna usaha, hipotek, asuransi, pensiun, pembayaran, transfer uang untuk lingkup lokal maupun internasional.<sup>8</sup>*

Menurut Kominfo, pada tahun 2016 penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 258,7 juta jiwa dan sekitar 85 persen diantaranya adalah pemeluk agama Islam. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia sangat berpotensi untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah, terutama dalam mendukung pendanaan prioritas-prioritas pembangunan, seperti proyek infrastruktur, pendidikan, dan pertanian.<sup>9</sup> Di samping itu, OJK sebagai regulator terus mengakselerasi pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia, yakni dengan melakukan berbagai program yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan lintas sektor. Tantangan-tantangan yang dihadapi dalam sektor keuangan syariah, antara lain keterbatasan suplai produk syariah; masih rendahnya tingkat literasi keuangan syariah dan tingkat utilitas produk keuangan syariah;

---

<sup>6</sup> Bank Indonesia, *Booklet Keuangan*

*Inklusif Jakarta* : Departemen Pengembangan Akses Keuangandan UMKM Bank Indonesia, 2014, 5

<sup>7</sup> *Ibid*, 5

<sup>8</sup> Nusron Wahid, *Ibid*, 26

<sup>9</sup> [www.kominfo.go.id](http://www.kominfo.go.id), diakses 27 Desember 2019, pukul 13.34

keterbatasan sumber daya manusia; perlunya optimasilisasi koordinasi dengan para pemangku kepentingan; serta perlunya kebijakan jasa keuangan yang selaras dan dapat saling mendukung perkembangan seluruh sektor keuangan syariah.<sup>10</sup>

Pemerintah Indonesia dan semua pemangku kepentingan dalam industri keuangan syariah menyepakati nilai penting keuangan syariah dan kebutuhan untuk mendukung dan memfasilitasi pertumbuhan industri ini.<sup>11</sup> Sebagai bentuk dukungan nyata dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia, Bank Indonesia telah mengembangkancetak biru strategi. Cetak Biru ekonomi dan keuangan syariah dirumuskan dalam 3 pilar strategis utama, yaitu : (i) pemberdayaan dan penguatan ekonomi syariah melalui pengembangan rantai nilai halal; (ii) pendalaman pasar keuangan syariah untuk mendukung pembiayaan syariah; dan (iii) memperkuat penelitian, penilaian dan pendidikan ekonomi dan keuangan syariah untuk meningkatkan literasi publik mengenai ekonomi dan keuangan syariah. Terkait pilar pertama, pemberdayaan dan penguatan ekonomi syariah dicapai melalui penguatan rantai nilai halal dengan mengembangkan ekosistem dari berbagai tingkat bisnis syariah, termasuk pesantren, UKM, dan perusahaan dalam rantai hubungan bisnis untuk memperkuat struktur ekonomi yang inklusif.<sup>12</sup>

Seperti yang sempat disinggung sebelumnya, Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, oleh karena itu, tidak mengeherankan jika pesantren di Indonesia berjumlah sangat banyak.<sup>13</sup> Terdapat 28.194 pesantren yang

---

<sup>10</sup> OJK, *Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019*, Jakarta: OJK, 2017, 6

<sup>11</sup> Bappenas, *Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia*, Jakarta: Bappenas, 2015, 34

<sup>12</sup> [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), diakses 29 Desember 2019 pukul 20.04

<sup>13</sup> Rita Kusumadewi dan Ayus Ahmad Yusuf, *Literasi Keuangan Syariah di Kangan Pondok Pesantren*, Cirebon: CV ElsiPro, 2019, 1

berpotensial dalam pendampingan untuk mendorong perekonomian masyarakat.<sup>14</sup> Pesantren adalah lembaga pendidikan berbasis Agama Islam yang didalamnya terdiri dari banyak unsur seperti Kyai, Ustadz, Ustadzah, Staff, dan santri. Lingkungan pesantren memiliki kekhasan tersendiri dimana warga pesantren menjalani kehidupan sehari-hari berlandaskan nilai-nilai agama Islam, karena setiap harinya para guru dan santri tersebut mengkaji Agama Islam.<sup>15</sup>

Melihat OJK memilih pesantren sebagai lembaga strategis dalam percepatan akses atau inklusi dan literasi keuangan syariah adalah pesantren dipandang memiliki kedekatan yang baik terhadap masyarakat sehingga memiliki pengaruh yang cukup baik dalam perkembangan masyarakat dalam bidang ekonomi Islam. Oleh karenanya, OJK memfasilitasi pembuatan model bisnis Bank Wakaf Mikro dengan platform Lembaga Keuangan Syariah. Terdapat 54 Bank Wakaf Mikro atau BWM yang tersebar di seluruh Indonesia per September 2018.<sup>16</sup> BWM merupakan salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang diinisiasi langsung oleh Presiden Joko Widodo kepada OJK. Tujuan pendirian BWM ini adalah untuk membangun ekosistem inklusi keuangan syariah di lingkungan pesantren yang sebelumnya belum terpapar produk keuangan. BWM menjangkau masyarakat yang belum mendapatkan akses layanan keuangan secara formal atau *unbankable*. Selain itu, untuk memberantas rentenir yang meresahkan masyarakat dengan cara penagihan dan skema utang yang menyulitkan. OJK memfasilitasi pembuatan model bisnis BWM dengan platform LKMS untuk mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana (donatur) untuk didonasikan

---

<sup>14</sup> OJK, *Bahan Sosialisasi Publik (Bank Wakaf Mikro)*, Jakarta: OJK, 2018, 6

<sup>15</sup> Rita Kusumadewi, *Ibid*, 3

<sup>16</sup> [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), diakses 29 Desember 2019 pukul 20.30

kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan usaha dengan imbal hasil sangat rendah.

Ada beberapa prosedur penilaian yang harus dilalui sebelum pesantren bisa dinyatakan layak untuk mendirikan BWM. Tim khusus OJK yang dibantu oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pertama-tama akan melihat apakah ada kebutuhan dari pesantren untuk membantu masyarakat di lingkungannya, lalu bagaimana komitmen serta kesiapan dari pesantren tersebut juga akan dinilai. Di Kota Kediri sendiri terdapat dua pondok pesantren yang dinilai layak untuk didirikan Bank Wakaf Mikro, yakni Pondok Pesantren Al Amien dan Pondok Lirboyo.<sup>17</sup>

Dari dua pondok pesantren tersebut, peneliti menemukan prestasi yang diraih Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi yang berdiri di bawah naungan Pondok Pesantren Lirboyo. BWM tersebut pernah meraih peringkat ke-2 Bank Wakaf Mikro terbaik se-Indonesia pada tahun 2018. Selain itu, di tahun 2019 meraih pula peringkat lembaga keuangan terbaik ke-4 se-Indonesia mewakili Kota Kediri yang diselenggarakan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award.<sup>18</sup>

Melihat prestasi tersebut, Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo ternyata memiliki strategi khusus dalam melangsungkan operasional lembaga tersebut, yakni strategi *Go Berkah.Go Berkah* merupakan strategi yang menjadi landasan Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo dalam membuat program-program yang sarat dengan pendekatan religi. Pendekatan strategi tersebut berupa perkumpulan secara berkala yang mana materi yang disampaikan selain materi perekonomian syariah juga bermuatan kajian fiqh dan materi keagamaan Islam lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan memberi

---

<sup>17</sup>[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), diakses 2 Januari 2020 pukul 21.17

<sup>18</sup>[www.antara.news.com](http://www.antara.news.com), diakses 2 Januari 2020 pukul 22.00

kelancaran dan kemudahan pembiayaan bagi nasabah. Selain itu, strategi ini berorientasi pada keberkahan dalam hal operasional lembaga dan nasabah BWM Berkah Berkah Rizqi Lirboyo Kota Kediri.<sup>19</sup>

Tabel 1.1 Kenaikan Nasabah dan Pembiayaan Tahun 2018-2019

Sumber: Website BWM Berkah Rizqi Lirboyo

Tabel di atas mencakup keterangan, diantaranya :**N.K**atau Nasabah Kumulatif merupakan total keseluruhan nasabah yang melakukan pembiayaan baik yang masih berlangsung maupun yang sudah tidak melakukan pembiayaann. Kemudian,

<b>Tahun</b>	2018	<b>2019</b>	2018	<b>2019</b>	2018	<b>2019</b>	2018	<b>2019</b>	2018	<b>2019</b>
<b>Ket.</b>	N.K.	<b>N. K</b>	N. Out	<b>N. Out</b>	Kumpi	<b>Kumpi</b>	P. Kum.	<b>P. Kum</b>	P. Out	<b>P. Out</b>
<b>Jumlah</b>	834	<b>1.600</b>	430	<b>516</b>	150	<b>150</b>	1 Milyar	<b>2,1</b> <b>Milyar</b>	217,1 Jt.	<b>296,1</b> <b>Jt.</b>

**N.O**atauNasabah Outstanding merupakan nasabah yang masih memiliki tanggungan pembiayaan.**Kumpi** merupakan kelompok-kelompok yang dibentuk untuk memudahkan atau membuat efektif pelaksanaan program-program BWM Berkah Rizqi Lirboyo.**P.K**atauPembiayaan Kumulatif merupakan total pembiayaan yang telah berlangsung di BWM Berkah Rizqi Lirboyo. Dan yang terakhir adalah **P.O.** atau Pembiayaan Outstanding, merupakan pembiayaan yang sedang berlangsung atau dilakukan oleh nasabah.

<sup>19</sup> M. SyaihuIzzat, Manager BWM Berkah Rizqi Lirboyo, 26 Januari 2020.

Tabel di atas menunjukkan adanya kenaikan yang cukup signifikan di Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo pada aspek nasabah dan pembiayaan yang mana juga menjadi bukti adanya kenaikan inklusivitas keuangan syariah. Dengan keunikan yang diperoleh demikian, peneliti memutuskan untuk mengkaji strategi lembaga tersebut dengan mengambil judul “Strategi *Go Barokah* Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo dalam Peningkatan Inklusi Keuangan Syariah pada Nasabah”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dan untuk mendapatkan tujuan yang dicapai, maka akan dilakukan pengkajian fokus penelitian, diantaranya :

1. Bagaimana strategi *Go Berkah* Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah pada nasabah?
2. Bagaimana peran Strategi *Go Berkah* Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo dalam meningkatkan inklusi keuangan pada nasabah?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui strategi *Go Berkah* Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah pada nasabah.
2. Untuk mengetahui peran Strategi *Go Berkah* Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo dalam meningkatkan inklusi keuangan pada nasabah.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara umum, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya serta sarana peneliti menyumbangkan pemikiran kajian keuangan inklusif.

2. Secara khusus, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan kajian pengembangan pihak Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo Kediri
3. Secara tidak langsung, penelitian ini menjadi sarana pengkajian mengenai inklusivitas keuangan syariah yang juga menjadi bagian dari ekonomi Islam.

#### **E. Telaah Pustaka**

*Beberapa penelitian terdahulu yang juga membahas mengenai strategi LKMS dan inklusi keuangan, diantaranya:*

1. Penelitian yang dilakukan Eva Yuni Kurnia M. mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya dalam skripsinya di tahun 2019 yang berjudul Implementasi Program Inklusi keuangan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pengusaha Kecil pada KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya menunjukkan bahwa terdapat kemudahan dalam mengakses ke KSPPS BMT Amanah Ummah, lokasi mudah dijangkau dan kualitas produk yang digunakan masih umum dan pengetahuan mengenai produk masih rendah. Dampak yang dihasilkan dari peran inklusi keuangan terhadap kesejahteraan pengusaha kecil yakni: pendapatan, pendidikan, dan kesehatan yang terlihat perubahannya.
2. Penelitian yang dilakukan Muhammad Alan Nur mahasiswa IAIN Surakarta dalam skripsinya 2019 yang berjudul Kontribusi Bank Wakaf Mikro terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro di Lingkungan Pondok Pesantren (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Al-Pansa) menunjukkan bahwa pembiayaan dan endampingan usaha yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Al Pasa berpengaruh terhadap adanya peningkatan produksi/jumlah penjualan, pendapatan usaha, laba usaha, dan kondisi perekonomian.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sukron mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah pada skripsinya di tahun 2011 yang berjudul Strategi Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Mengembangkan dan Meningkatkan Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (Studi pada BMT Al Munawwarah Pamulang) menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh BMT tersebut adalah datang langsung ke tempat yang calon nasabah, rekomendasi mitra lama, promosi dengan brosur yang disebar di masjid, jenis usaha yang dibiayai.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Supriadi Muslimin mahasiswa UIN Alauddin Makassar dalam skripsinya di tahun 2015 yang berjudul Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus pada BMT Al Amin Makassar) menunjukkan bahwa BMT tersebut memiliki potensi dan peranan yang sangat besar dalam upaya mendukung pemberdayaan UMKM yang memberikan pembiayaan jasa layanan kepada masyarakat, setidaknya hal ini dapat dilihat dalam praktek pemberdayaan UMKM yang dilakukan BMT Al Amin Makassar yang memberikan pembiayaan jasa layanan kepada masyarakat melalui pembiayaan mudhorobah dengan nisbah sistem bagi hasil sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang berakad.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Sofuan Jauhari mahasiswa UIN Sunan Ampel dalam skripsinya tahun 2018 yang berjudul Keuangan Inklusif untuk Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Usaha Mikro menunjukkan bahwa program KUBerdaya yang ada di LMI Kota Kediri telah mampu memberikan pemberdayaan terhadap pengembangan usaha mikro, meskipun belum secara signifikan.

Persamaan penelitian yang akan dilakukan ini dengan penelitian-penelitian di atas adalah metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif serta pengkajian lingkup lembaga keuangan mikro syariah. Sedangkan perbedaan yang didapat ada pada fokus yang diteliti. Penelitian yang akan dilakukan ini berfokus pada strategi yang disusun oleh pihak Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo sehingga terdapat peningkatan inklusi keuangan yang terjadi pada tiap tahunnya.

